

Gerakan Sosial dan Mobilisasi Sumber Daya dalam Memperjuangkan Pengakuan Kepercayaan Berbeda

Tesa Amyata Putri^{1*}, Bintarsih Sekarningrum², Muhammad Fedryansyah³

^{1,2,3} Universitas Padjajaran

*Corresponding author, e-mail: tesa19001@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gerakan sosial yang dilakukan oleh organisasi Aliran Kebatinan Perjalanan (AKP), dalam memperjuangkan pengakuan keyakinan mereka di Indonesia. Masalah ini menarik karena, Mahkamah Konstitusi saat ini telah memberikan layanan kependudukan dan pencatatan sipil pada para penghayat kepercayaan untuk mengisi kolom agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya sesuai yang diatur di dalam Surat Keputusan MK No. 97/PUU-XIV/2016. Hal ini merupakan bukti dari keberhasilan kelompok aliran kepercayaan memperjuangkan keyakinannya dan melepaskan diri dari 6 agama yang dipaksakan oleh negara. Salah satu organisasi aliran kepercayaan yang aktif memperjuangkan hak beragama dan keyakinannya adalah organisasi Aliran Kebatinan Perjalanan yang ada di Kota Bandung. Perjuangan dan keberhasilan tersebut memperlihatkan adanya gerakan sosial yang terorganisir agar tujuan yang diinginkan organisasi Aliran Kebatinan Perjalanan tercapai. Artikel ini menganalisis hal tersebut dengan menggunakan Teori mobilisasi sumber daya (Resources Mobilisation Theory) Anthony Oberschall sebagai pisau analisis dalam artikel ini. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan Teknik observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan organisasi AKP merupakan wujud dari gerakan sosial. Sedangkan keberhasilan organisasi AKP ditentukan dari pemaksimalan berbagai sumber daya organisasi AKP baik secara internal maupun eksternal. Salah satu faktor terbesar dari keberhasilan gerakan sosial AKP adalah kemampuan dalam memobilisasi sumber daya dengan baik dan pemanfaatan peluang politik yang dilakukan oleh organisasi ini.

Kata Kunci: Aliran Kepercayaan; Gerakan Sosial Baru; Teori Mobilisasi Sumber Daya.

Abstract

The aim of this paper is to analyze the social movements of Travel Kebatinan Movement (AKP), in order to strive for the recognition of their beliefs in Indonesia. This topic is interesting to observe mainly because its relation towards current constitution policy in Indonesia which has stated that civil registration like ID card is needed to fill in religion column in accordance with constitution No. 97/PUU-XIV/2016. This shows that the success of believers in expressing their beliefs and breaking away from the 6 religions imposed by the country. One of the organizations which is up until now still actively for their right, is Mystical Travel organization in Bandung. Their struggles and successes show that there is a social movement like Travel Kebatinan Stream organization that achieved their goals. This article uses Anthony Oberschall's Resource Mobilization Theory as an analytical tool in this article. Also, this article uses a qualitative method with observation, interviews, and literature studies. The results showed that the formation of the AKP organization was a form of social movement. Meanwhile, the success of the PPA organization is determined by maximizing various PPA organizational resources both internally and externally. One of the biggest factors in the success of the AKP social movement is the ability to mobilize resources properly and take advantage of political opportunities carried out by this organization.

Keywords: Aliran Kepercayaan, New Social Movements, Resource Mobilization Theory.

How to Cite: Putri, T.A., Sekarningrum, B., & Fedryansyah, M (2022). Gerakan Sosial dan Mobilisasi Sumber Daya Dalam Memperjuangkan Pengakuan Kepercayaan Berbeda di Indonesia (Studi Kasus: Aliran Kebatinan Perjalanan Kota Bandung). *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 9(1), 22-31.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited under the same license as the original. ©2022 by Jurnal Socius.

Pendahuluan

Kelompok penghayat kepercayaan merupakan kelompok penganut satu keyakinan spiritual yang masih dianut hingga kini oleh sebagian kelompok atau masyarakat Indonesia. Aliran kepercayaan merupakan realitas agama berbasis lokalitas (indigenous religion) yang keberadaannya diakui dan diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2006 (Faridah, 2020; Kurniawan, 2017). Aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa didefinisikan sebagai pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia, yang kemudian para penganutnya disebut sebagai Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Hernandi, 2014).

Pada tahun 2016 organisasi penghayat kepercayaan yang aktif di Indonesia tercatat ada sebanyak 155 organisasi yang terus mengalami penyusutan (Bustami, 2016). Bukan tanpa halangan, nyatanya sebelum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi pada No. 97/PUU-XIV/2016, keberadaan kelompok penghayat kepercayaan penuh dengan berbagai dikriminasi baik secara konstitusional (Jufri, 2020; Konradus, 2018), diskriminasi sosial dari agama mayoritas dan stigmatisasi (Budijanto, 2016; Hamid, 2018). Hal ini mengakibatkan para penghayat takut mengakui identitasnya karena tidak adanya jaminan dan perlindungan.

Diskriminasi terlihat dalam UU PNPS 1965, aliran kepercayaan dituntut atas dasar penodaan agama dan TAP MPR 1978 yang menyatakan aliran kepercayaan atau kebatinan sebagai produk budaya bukan agama (Amrullah, 2017; Jufri & Mukhlis, 2019). Ketetapan tersebut tidak hanya memaksa para penghayat masuk pada agama induk (6 agama resmi Indonesia) (Konradus, 2018; Dian Kurnia Sari, 2018), namun berakibat pula pada pandangan masyarakat yang menganggap bahwa para penghayat bagian dari komunis (Konradus, 2018).

Maka dari itu, munculnya keputusan Mahkamah Konstitusi pada No. 97/PUU-XIV/2016 seakan menjadi angin segar bagi para penghayat kepercayaan yang hidup dalam 6 agama resmi namun merasa bukan dari bagian salah satu agama tersebut dan dalam kehidupannya selalu melakukan ritual aliran kepercayaan yang dianutnya. Regulasi tersebut telah memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kebebasan para penghayat kepercayaan untuk memilih dan memeluk agama yang diyakini (Salfutra et al., 2019). Hal ini tidak hanya mendorong kepercayaan diri aliran kepercayaan untuk mengakui dirinya sebagai penghayat kepercayaan (Hakiki, 2011). Secara sosial dan budaya Harsyahwardhana (2020) melihat putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijadikan basis legitimasi para penghayat aliran kepercayaan dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan kepercayaan mereka secara lebih terang-terangan, memunculkan kebiasaan untuk menampilkan kultur aliran kepercayaan sesuai golongan tanpa batasan, serta menghilangkan tekanan atas tantangan untuk mempertahankan identitas dan ajarannya.

Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi pada No. 97/PUU-XIV/2016, tidak hanya dapat dilihat sebagai wujud atensi pemerintah terhadap kelompok penghayat kepercayaan yang berbeda dengan 6 agama resmi yang ada di Indonesia. Dari perspektif lain, keputusan tersebut dapat dilihat pula sebagai wujud baru dari sebuah eksistensi kelompok penghayat kepercayaan sebagai sebuah fakta adanya keberadaan dan perjuangan kelompok minoritas untuk mendapatkan hak yang sama di mata hukum Indonesia.

Salah satu organisasi aliran kepercayaan yang terlibat aktif dalam perjuangan pengakuan atas kepercayaan yang diyakininya adalah organisasi Aliran Kebatinan Perjalanan atau dapat disingkat menjadi AKP. Diawal kemunculannya AKP merupakan kelompok aliran kepercayaan berbasis komunitas, yang kemudian pada tahun 1970 berubah menjadi organisasi formal dan legal akibat munculnya kesadaran perlunya landasan konstitusional untuk melindungi eksistensi kelompok aliran kebatinan (Jufri, 2020).

Pembentukan organisasi sebagai upaya melindungi kelompok dari kepunahan dan muncul akibat diskriminasi dan stigmatisasi yang dialami, serta muncul kebaruaran pengakuan yang disahkan oleh pemerintah melalui putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2016 memperlihatkan bahwa kelompok AKP melakukan sebuah gerakan sosial untuk memperjuangkan keyakinannya, meskipun mengalami diskriminasi dan stigmatisasi. Gerakan sosial muncul dari adanya ketidakpastian yang diresahkan dan keprihatinan akan krisis identitas yang dirasakan (Haris et al., 2019; Porta & Pavan, 2017). Adanya perjuangan aliran kepercayaan hingga akhirnya mendapat pengakuan secara hukumnya dilihat oleh Giddens & Sutton (2017) sebagai sebuah gerakan yang membawa pesan simbolis pada isu yang telah dalam tidak terlihat dan membantu revitalisasi budaya demokrasi di kehidupan modern yang lesu di banyak negara.

Ketetapan hukum, di mana aliran kepercayaan dapat mengosongkan atau menuliskan keyakinannya pada kolom agama dalam kacamata gerakan sosial dilihat sebagai progres atau keberhasilan dari pergerakan sosial itu sendiri. Keberhasilan gerakan sosial tidak hanya dilihat dari bagaimana kelompok melakukan

penetapan dan menggoncangkan negara, akan tetapi dari adanya perubahan masyarakat sipil, perilaku, sikap, simbol-simbol kultural dan sistem nilai yang dianut (Bayat, 2005). Selain itu, pembentukan organisasi yang muncul dari kesadaran eksistensi aliran kepercayaan yang mulai hilang pun dilihat gerakan sosial sebagai strategi pergerakan. Pembentukan organisasi bertujuan agar kelompok dapat mengembangkan idealisme dan wadah pencapaian tujuan yang dapat menghasilkan kapasitas sumber daya dan jaringan (Selinaswati, 2016; Subaktiar & Indarti, 2020).

Munculnya keputusan hukum terhadap eksistensi aliran kepercayaan serta pembentukan organisasi Aliran Kebatinan Perjalanan yang menunjang keberadaan AKP merupakan dua irisan yang menarik untuk diteliti. Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana organisasi Aliran Kebatinan Perjalanan di lingkungan Kota Bandung melakukan gerakan sosial dari teori Resource Mobilization Theory (RMT) dan sumber daya apa saja yang menunjang keberhasilan organisasi ini dalam melakukan gerakan sosial. Untuk menjawab hal tersebut, maka artikel ini bertujuan mendeskripsikan serta menganalisis gerakan sosial yang dilakukan AKP dari teori Resource Mobilization Theory (RMT) dan sumber daya apa saja yang menunjang keberhasilan organisasi AKP dalam melakukan gerakan sosial.

Kajian tentang gerakan sosial aliran keagamaan ini menarik untuk dikaji dalam konteks Indonesia, dengan menggunakan analisis Resource Mobilization Theory (RMT). Hal ini karena selama ini kajian tentang aliran keagamaan mayoritas dibahas dalam perspektif agama, sementara isu ini merupakan fenomena sosial yang juga seharusnya dianalisis dari perspektif sosiologis, sehingga memberikan analisis kritis terhadap fenomena beragama di satu sisi, dan perjuangan eksistensi identitas sebuah komunitas di sisi lainnya. Atas dasar itu maka tulisan ini memberikan kontribusi dan nilai kebaruan terutama dalam mengkaji tentang kepercayaan sebagai bentuk perjuangan, sekaligus perlawanan terhadap nilai-nilai kemapanan keagamaan yang ditetapkan oleh masyarakat dan negara.

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif tepat digunakan untuk mengungkapkan perjuangan organisasi AKP dalam melakukan gerakan sosial, di mana dalam analisisnya diperlukan untuk menggali secara dalam subjek penelitian. Hal ini selaras dengan pernyataan Moleong (2007) di mana pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkapkan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya subjek penelitian secara holistik dan dalam konteks yang alamiah. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara primer melalui wawancara.

Informan dalam penelitian ini diantaranya adalah; Ketua Aliran Kebatinan Perjalanan di Kota Bandung, Warga AKP, serta Pra-warga AKP di beberapa lokasi yang berbeda sesuai situasi dan kondisi. Agar menguatkan keabsahan data yang digali, maka peneliti pun menggunakan data sekunder yaitu dengan studi literatur yang didapat dari dokumen digital dari laman website AKP, Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Aliran Kebatinan Perjalanan di Kota Bandung, dan buku atau jurnal lainnya yang menunjang pengungkapan data secara koheren.

Hasil dan Pembahasan

Aliran Kebatinan Perjalanan sebagai salah satu aliran kepercayaan di Indonesia

Aliran Kebatinan Perjalanan merupakan salah satu aliran kepercayaan yang ada di Indonesia yang hingga kini masih lestari. Jika ditarik lebih luas terlebih dahulu, aliran kepercayaan sendiri adalah sebuah ajaran kebatinan (rahasia) murni dalam diri manusia untuk mencapai kebahagiaan, ketentraman jiwa dan kemanunggalan atau kebersatuan dengan Tuhan (Lubis, 2019). Aliran ini berusaha menyelami kepekaan jiwa, menghayati dunia dan kehidupan sebagai tujuan dalam konteks kehidupan dan sifat Tuhan imanen (ada dalam diri manusia) sehingga untuk mencari Tuhan maka perlu menemukannya dengan jati diri sendiri dan hayati sebagai kesatuan (Teguh, 2019). Pengakuan keberadaan aliran kepercayaan di Indonesia tercantum pada Undang-Undang No. 23 tahun 2006 dan PP 37 tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Aliran kepercayaan kini dinaungi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini didasarkan pada perbedaan tersebut sehingga aliran kepercayaan dimasukkan kepada kearifan lokal Indonesia dalam kekayaan nilai spiritual. Aliran kepercayaan dianggap sebagai keyakinan atau kepercayaan yang berasal dari diri manusia, sehingga diklasifikasikan sebagai hasil kreasi oleh pikir dan oleh diri manusia. Sehingga sampai saat ini aliran-aliran kebatinan atau kepercayaan masih dianggap bukan agama, ia adalah produk manusia, karena itu, kebatinan lebih tepat disebut dengan “kebudayaan spiritual” atau “kebudayaan batin”.

Aliran kebatinan Perjalanan didirikan pada tanggal 17 September 1927 oleh tiga orang pendirinya, yaitu Mei Kertawinata, M. Rasid dan Sumitra. Ajaran ini di deklarasikan di Kampung Cimerta, Subang, Jawa Barat pada pukul 12.00. Lahirnya aliran kebatinan Perjalanan ini dimulai dari wangsit yang diterima secara bertahap oleh para pendirinya. Pengertian wangsit itu sendiri adalah suara gaib yang diterima sebagai suatu petunjuk (Supriatna et al., 2003). Nama Perjalanan diambil dari kata “nglampahi” yang mempunyai arti bahwa untuk mewujudkan segala cita-cita dan/ atau usaha apapun, baik yang bersifat kelahiran maupun kebatinan, haruslah dengan menjalani (nglampahi), juga karena antara pangkal cita-cita dan keinginan hingga terwujudnya tujuan akhir terdapat jarak (antara) yang harus ditempuh dan dijalani (dilampahi). Hal tersebut digambarkan sebagai air yang menetes keluar dari sumber yang mengalir terlebih dahulu ke selokan, ke sungai kemudian sampai ke samudera. Perjalanan yang harus ditempuh oleh air dari sumber sampai ke samudera mendatangkan manfaat bagi kehidupan. Demikian juga dengan manusia dalam mewujudkan cita-cita untuk mencapai tujuan akhir harus meleburkan diri dalam kehidupan masyarakat agar dapat bermanfaat bagi dirinya dan orang lain (Supriatna et al., 2003).

Tujuan Aliran Kebatiran Perjalanan adalah terwujudnya kerukunan hidup dalam lingkungan bersama (peri-kemanusiaan) yang bersatu (manunggal) dalam wujud Tuhan Yang Maha Esa (tunggal saling selamat menyelamatkan). Tujuan ini merupakan puncak dari segala perbuatan manusia yang melakukan darma bakti sebagai insan yang mengabdikan kepada kewajibannya untuk menunggalkan hidup Ketuhanan YME (sepi ing pamrih, rame ing gawe, memayu hayuning bawana), memandang kepada diri yang lain seperti kepada dirinya sendiri (kemanusiaan). Melakukan amal perbuatan terhadap siapapun dengan tidak memandang/mengutamakan pangkat, kedudukan sosial, harta kekayaan dan sebagainya.

Gerakan Sosial Aliran Kebatiran Perjalanan

Organisasi Aliran Kebatiran Perjalanan di Kota Bandung merupakan salah satu organisasi aktif dalam menyuarakan suaranya pada pemerintah dan berpegang teguh pada keyakinan yang dimilikinya, meskipun secara status tercatat sebagai salah satu penganut ke-6 agama resmi di Indonesia. Namun demikian, secara ritual keagamaan dan pengalaman spiritualnya baik yang sudah menjadi warga penghayat maupun pra-warga masih mengamalkan ajaran aliran kebatiran perjalanan. Salah satu penguatan ajaran kepercayaan tersebut terakomodir dalam organisasi Aliran Kebatiran Perjalanan ini. Pembentukan organisasi serta adanya upaya perjuangan yang dilakukan baik secara internal (pengumpulan partisipan atau anggota organisasi agar tetap sayu keyakinan) serta usaha-usaha yang dilakukan secara eksternal (meminta hak asasi manusia sebagaimana mandat UUD 1945 kepada pemerintah), dalam kajian sosiologis dalam dilihat sebagai wujud dari gerakan sosial dan bukan hanya sekadar pembentukan organisasi sosial semata. Gerakan sosial sendiri merupakan gerakan revolusioner, aksi kolektif, terorganisir, berkelanjutan, dan non-institusional yang berupaya paling tidak menggulingkan otoritas, pemegang kekuasaan, atau kepercayaan dan praktik budaya (Goodwin & Jasper, 2015). Sedangkan Haris et al (2019) menyebutkan bahwa gerakan sosial adalah gerakan yang dilakukan sejumlah orang dengan tujuan menciptakan perubahan terhadap suatu nilai yang sudah mapan di masyarakat yang didorong oleh adanya ketidakpastian yang diresahkan sekelompok orang melalui rangkaian tahapan gerakan semisal tahap kegelisahan, kegusaran, formalisasi hingga tahap kelembagaan. Bagi Jurdi (2013), pergerakan sosial dilihat sebagai formulasi perlawanan konsepsi, gagasan norma-norma, atau nilai-nilai mapan dimasyarakat. Sehingga Gerakan sosial dapat dikatakan sebuah usaha untuk memperjuangkan hal-hal yang berbeda dari kemapanan atau kewajaran yang sudah terstruktur dalam masyarakat.

Dari penjelasan tersebut, hal ini tercermin dalam perjuangan yang dilakukan oleh kelompok aliran kepercayaan, yaitu aliran kebatiran perjalanan. Jika ditinjau menggunakan konsep Gerakan sosial, Aliran Kebatiran Perjalanan merupakan organisasi gerakan kolektif yang melakukan upaya untuk mengubah persepsi aliran kepercayaan di mata hukum dan masyarakat. Perjuangan ini berbasiskan keresahan organisasi terhadap kepercayaan yang diyakininya berbeda dengan status agama dalam catatan sipil, sehingga memunculkan keresahan karena tidak merasa bagian dari ke-6 agama yang ditentukan. Dari banyaknya perjuangan dan pertahanan yang dilakukan aliran kepercayaan, terbentuknya organisasi pada tahun 1970 serta tercapainya pengakuan negara terhadap aliran kepercayaan yang diyakininya inilah merupakan wujud nyata gerakan sosial masyarakat sipil terhadap apa yang diyakini dan diperjuangkannya.

Pemahaman terkait Gerakan sosial dalam artikel ini lebih diarahkan pada perspektif gerakan sosial baru (new social movement). Pergerakan sosial baru dilakukan oleh kumpulan orang-orang yang berpikiran rasional, perhitungan aksi Gerakan secara matang, aktor dan anggota jelas, serta memiliki visi ke depan yang jelas (Rusmanto, 2012). Gerakan sosial dalam paradigma baru sendiri dilihat lebih bervariasi dan perjuangan yang lebih bermacam-macam. Sebagaimana Singh (2010) melihat bahwa gerakan sosial kini lebih tertarik pada pluralitas sebagai ekspresi (polymorphous) yang salah satunya berkaitan dengan kebebasan sipil, kebebasan personal dan perdamaian. Gerakan sosial baru pun lebih banyak mengadopsi bentuk-bentuk organisasi yang longgar, menggunakan repertoar aksi baru, tanpa kekerasan dan pelibatan kelas-kelas

menengah seperti pekerja di birokrasi, bidang kreatif dan artistik, dan kalangan Pendidikan ([Giddens & Sutton, 2017](#)).

Penciptaan dan pembangunan identitas kolektif dalam gerakan sosial disatukan oleh keyakinan, tujuan, dan tindakan kolektif ([Reger et al., 2008](#)). Gerakan sosial memiliki dampak pada kebangkitan kesadaran identitas kolektif, dapat menjadi wadah strategis dalam mereproduksi nilai, memperkuat tradisi serta menguatnya nilai-nilai kepercayaan, serta memperjelas partisipan dalam pergerakannya ([Haryanto et al., 2013](#); [Lampe, 2018](#); [Martyńska, 2018](#); [Purnomo, 2005](#); [Riadi & Drajat, 2019](#); [Dewi Kartika Sari & Siahainenia, 2015](#)). Gerakan sosial pun membantu mengatasi permasalahan kesadaran dan masa depan komunitas ([Singh, 2010](#)), dan juga dapat menjadi model alternatif strategi perubahan dengan aktualisasi kesadaran sosial yang ditransmisi dalam simbol-simbol gerakan ([Langman, 2013](#); [Nas, 2016](#); [Zahara, 2020](#)). Hal ini sesuai dengan tujuan dari pembentukan organisasi Aliran Kebatinan Perjalanan, di mana asas pembangunan organisasi dilakukan atas dasar kesadaran bahwa aliran kepercayaan memerlukan naungan legal agar dapat menjaga eksistensi aliran kepercayaan di mata penganutnya sendiri dan lebih luas dalam mata pemerintah dan masyarakat. Selain itu adanya organisasi yang jelas, nyatanya tidak hanya menjadi naungan para penghayat mengimani kepercayaannya, namun juga membangun kesadaran-kesadaran para penghayat pada kepercayaannya, serta para simpatisan-simpatisan yang memang memperhatikan kelompok penghayat sebagai kelompok minoritas dalam masyarakat.

Pengakuan negara yang tertuang pada putusan Mahkamah Konstitusi pada No. 97/PUU-XIV/2016 yang menjamin dan melindungi kepercayaan yang diyakini oleh para penghayat kepercayaan terkhusus salah satunya organisasi Aliran Kebatinan Perjalanan merupakan bukti bahwa kelompok ini melakukan sebuah perjuangan pada apa yang mereka anggap sebagai sebuah haknya dari negara. Perjuangan ini berawal pada sebuah kesadaran yang diyakini Aliran Kebatinan Perjalanan bahwa jika ingin menyatu dengan Tuhannya, mereka perlu melakukan segala sesuatu dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab pada apa yang dilakukannya agar terhindar dari kehidupan yang tidak berperi-kehidupan kemanusiaan dan menjauhkan dirinya pada unsur-unsur Ketuhanan Yang Maha Esa. Kekhidmatan pada kepercayaan yang sangat diyakininya inilah yang menggiring keresahan para penghayat melakukan gerakan sosial atas dasar kesadaran bahwa yang diyakininya berbeda dengan paksaan negara yang menuntut para penghayat masuk dalam enam agama resmi. Status agama para penghayat yang berbeda-beda akibat paksaan peraturan negara yang mengharuskan mereka masuk pada enam agama yang ditetapkan pada masa lalu, kini berusaha dipulihkan oleh gerakan sosial melalui berbagai pergerakan – pergerakan sosial.

Mobilisasi Sumberdaya Gerakan Aliran Kebatinan Perjalanan

Teori mobilisasi sumber daya (Resource Mobilization Theory) merupakan teori yang diperkenalkan oleh Anthony Oberschall yang meneliti bagaimana gerakan sosial dapat muncul dan berhasil dengan proses-proses sosial yang dilakukannya ([Sukmana, 2016](#)). Mobilisasi (mobilization) sendiri mengacu pada proses pembentukan kerumunan, kelompok, asosiasi, dan organisasi untuk mencapai suatu tujuan kolektif ([Oberschall, dalam Locher, 2002](#)) Teori mobilisasi sumber daya berasumsi bahwa jika ada ketidakpuasan yang terjadi dalam suatu masyarakat, hal tersebut cukup memungkinkan gerakan sosial muncul ([Sukmana, 2016](#)). Gerakan sosial dimaknai oleh para pemikir teori mobilisasi sumber daya sebagai Gerakan kontemporer yang syarat akan bentuk komunikasi dan organisasi yang canggih dibanding gerakan sosial ‘lama’ yang cenderung tidak terorganisir dengan baik ([Sukmana, 2016](#)). Gerakan sosial dalam kacamata teori mobilisasi sumber daya justru melihat bahwa perilaku kolektif dilakukan dengan mobilisasi pergerakan yang terorganisir, dan pembentukan organisasi sebagai wadah gerakan justru diperlukan untuk memelihara tujuan yang ingin dicapai serta pergerakan berlangsung berkelanjutan. Dari penjabaran tersebut, maka adanya pembentukan organisasi AKP dapat dilihat sebagai sebuah bagian strategis yang minimal dapat menghimpun para penganut aliran kebatinan perjalanan dalam satu naungan organisasi. Naungan organisasi ini pun tidak hanya sebagai wadah dan sarana para penghayat melakukan ritual atau aktivitas kepercayaannya saja, namun dijadikan wadah mobilisasi dan penghimpunan sumber daya-sumber daya dari partisipan untuk gerakan sosial.

Teori mobilisasi sumber daya sendiri, melihat bagaimana mobilisasi sumber daya yang dimiliki oleh organisasi gerakan sosial baik secara internal dan eksternal dikelola untuk mendukung ketercapaian gerakan sosial. Faktor penentu dari keberhasilan dalam teori ini dilihat dari bagaimana organisasi gerakan sosial memanfaatkan keberadaan jaringan (network) secara struktural maupun non-formal ([Santoso, 2015](#); [Sukmana, 2016](#); [Suwarno, 2016](#)). Selain sumber daya yang dimiliki, kemunculan pergerakan sosial juga perlu melihat struktur di negaranya. Sebagaimana ([Sukmana, 2016](#)) mengatakan bahwa jika negara kuat dan represif, maka gerakan sosial akan sulit mencapai tujuannya, sehingga dalam teori mobilisasi sumber daya berpandangan bahwa keberadaan struktur pemerintah menentukan akses kelompok terhadap sumberdaya masyarakat. Sehingga, teori ini juga berfokus pada bagaimana aktor sosial yang rasional terlibat dan melihat peluang yang ada dari proses politik ([Edwards & Gillham, 2013](#); [Golhasani & Hosseinirad, 2016](#)). Aktor

sosial yang melakukan gerakan sosial disini juga sering dilihat sebagai bagian kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat memobilisasi secara efektif “ketersediaan” sumber daya dan mengaksesnya untuk mengejar tujuan perubahan sosial yang mereka inginkan ([Edwards & Gillham, 2013](#)).

Selain itu, tindakan kolektif dalam teori mobilisasi sumber daya dipahami sebagai komitmen politik dengan konflik politik atau budaya tertentu di mana tujuannya didasarkan pada pencapaian perubahan sosial atau kelanjutan status quo dan berdasarkan identitas bersama yang spesifik ([Cacheda & Outeda, 2021](#)). Setelah adanya pengorganisasian diri, mobilisasi ketersediaan sumber daya, hingga peluang politik yang dimanfaatkan untuk keberhasilan gerakan sosial, tugas penting lainnya dari gerakan sosial menurut (Muary & Ismail, 2017) adalah memunculkan simpati elit-elit dan masyarakat secara umum terhadap cita-cita gerakan sebagai dampak adanya gerakan sosial tersebut.

Dari penjelasan di atas, teori mobilisasi sumber daya memiliki tiga fokus dalam melihat kemunculan dan keberhasilan gerakan sosial, yaitu ketersediaan sumber daya, peluang politik, serta mobilisasi dari hal tersebut. Tiga fokus tersebut diaplikasikan dalam mengkaji organisasi Aliran Kebatinan Perjalanan mengelola dan memobilisasi sumber daya dalam gerakan sosial. Faktor determinan dalam melihat kemunculan dan keberhasilan dari oleh Oberschall meliputi (1) Organisasi gerakan sosial; (2) Pemimpin dan kepemimpinan; (3) Sumber daya dan mobilisasi sumber daya; (4) Jaringan dan partisipasi, dan ; (5) Peluang dan kapasitas masyarakat, digunakan untuk menjelaskan lebih detail terkait organisasi Aliran Kebatinan Perjalanan di Kota Bandung.

Organisasi gerakan sosial, sebagaimana teori mobilisasi sumber daya hadir menjadi faktor determinan yang penting di mana pembentukan organisasi tersebut inilah yang menjadi roda penggerak utama dalam memobilisasi bahkan mengumpulkan sumber daya untuk melakukan sebuah tujuan tertentu dalam cakupan ini ialah gerakan sosial itu sendiri. Organisasi sendiri dalam pemikiran Porta dan Diani (2006) merupakan identitas yang bersifat kompleks atau formal, untuk mencapai tujuan yang ingin diimplementasikan dalam suatu Gerakan sosial (social movement) ([Sukmana, 2016](#)). Selain itu, organisasi sosial pun dilihat sebagai asosiasi orang-orang yang melakukan tuntutan moral dan ideal tentang bagaimana seharusnya kehidupan personal atau kelompok termarginalkan dari masyarakat diorganisasikan ([Sukmana, 2016](#)). Pada Gerakan sosial, pembentukan organisasi berbicara perihal bagaimana orang-orang atau kelompok bekerjasama dan melibatkan diri dalam suatu kelompok pergerakan sosial atas apa yang mereka anggap ideal dan seharusnya terjadi. Hal inilah yang dirasakan pula dari adanya keberadaan organisasi Aliran Kebatinan Perjalanan di Kota Bandung. Tidak hanya urgensi pembentukan organisasi pada tahun 1970-an namun terkait apa yang mereka yakini dan perjuangkan salah satunya dengan pembentukan organisasi Gerakan sosial itu sendiri. Konsep ideal yang muncul dari kelompok aliran kebatinan perjalanan sendiri tertuang dari percakapan terkait bagaimana mereka meyakini bahwa pemerintah tidak dzalim kepada mereka meskipun sudah melalui rintangan hukum yang banyak menyudutkan mereka. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Aliran Kebatinan Perjalanan Kota Bandung, yaitu Bapak Nanang yang mengatakan bahwa Pancasila tidak mendiskriminasi kelompok dan tidak merasa terdiskriminasi, hanya saja ada ketidaktahuan entah dari pemangku kebijakan atau dari pemerintah itu sendiri. Alasan menarik pula tertuang dari pernyataan beliau yang juga mengatakan sebagai warga negara yang baik maka kelompok aliran kebatinan perjalanan perlu membentuk sebuah organisasi legal secara hukum agar sesuai dengan amanat UUD 1945 dan ketentuan pemerintah. Lebih lengkap pembentukan organisasi Aliran Kebatinan Perjalanan di Kota Bandung pun tertuang pada Laporan Tahunan Dewan Musyawarah Daerah Kota Bandung Aliran Kebatinan “Perjalanan” tahun 2020 pada Pasal 2 tentang asas dan Pasal 3 tentang sifat yang menyatakan untuk menjadi pribadi warga AKP yang cageur, bageur, bener, pinter harus dilakukan secara bersama-sama dan organisasilah yang menjadi wadah untuk mencapai hal tersebut, yang mana gerak organisasi selalu dijiwai Pancasila sebagai dasarnya, kekeluargaan dan gotong royong sebagai sifatnya dan kerukunan hidup dalam wujud Tuhan Yang Maha Esa sebagai tujuannya.

Alasan pembentukan organisasi Aliran Kebatinan Perjalanan khususnya di Kota Bandung ini menjadi landasan pergerakan sosial dalam ranah ideologi. Sebagaimana ([Febriani, 2017](#)) dalam penelitiannya menerangkan bahwa organisasi gerakan sosial, merupakan sistem nilai bersama, perasaan dari komunitas, norma tindakan dan struktur organisasi. Sistem nilai Bersama yang dianut aliran kebatinan perjalanan yang berlandaskan UUD 1945 serta Pancasila dapat dikatakan sebagai ruh dari Gerakan sosial ini sendiri yang diyakini untuk hidup ber-peri kemanusiaan dan manunggal (Bersatu) dengan Tuhan Yang Maha Esa perlu terwujud dengan pengamalan Pancasila itu sendiri yang perlu diperjuangkan organisasi ini agar hidup dalam kebersatuan tersebut.

Pemimpin gerakan (leaders movement) didefinisikan sebagai pembuat keputusan strategis (strategic decision-makers) yang menginspirasi dan mengorganisasi orang lain untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial ([Sukmana, 2016](#)). Pemimpin berfungsi sebagai mobilisator (mobilizer) menginspirasi partisipan (inspiring participants), dan di luar gerakan pemimpin berfungsi sebagai artikulator yang menghubungkan antara gerakan dengan masyarakat luas, namun meskipun demikian, karena kompleksitas dari gerakan,

maka fungsi dan peran pemimpin dalam gerakan juga bisa bervariasi (Sukmana, 2016). Dari hal tersebut dapat terlihat bahwa pemimpin sebuah organisasi gerakan sosial dan bagaimana pemimpin dalam kepemimpinan memiliki arti yang sama pentingnya untuk keberhasilan gerakan sosial. Dalam Aliran Kebatinan Perjalanan, agar organisasi berjalan dengan baik dengan massa atau anggota gerakan sosial yang tersebar di Kota Bandung, maka Aliran Kebatinan membagi struktur organisasi menjadi beberapa bagian dari skala pusat hingga skala lokal, dengan koordinator bidang-bidang khusus dalam program untuk mengimplementasikan gerakan sosial. Sehingga disetiap skala memiliki pimpinan – pimpinan yang memobilisasi struktur dan anggota aliran kebatinan perjalanan di Kota Bandung.

Sumber daya dan mobilisasi sumber daya menjadi faktor determinan selanjutnya dan dapat dikatakan sebagai bahan bakar dari penentu kegagalan atau keberhasilan gerakan sosial yang ada. Terdapat 5 tipe sumber daya (resources) yang dimiliki gerakan sosial menurut Edwards & McCarthy (Sukmana, 2016), yaitu sumber daya moral (moral resources), sumber daya kultural (cultural resources), sumber daya organisasi-sosial (social-organizational resources), sumber daya manusia (human resources), dan sumber daya material (material resources). Aliran Kebatinan Perjalanan sendiri sudah memiliki beberapa sumber daya yang dapat menjaga dan memajukan pergerakan pada goal achievement yang ingin di raih. Sumber daya moral (moral resources) yang dimiliki Aliran Kebatinan Perjalanan meliputi legitimasi atau hak kekuasaan yang diberikan dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001704.AH.01.07 Tahun 2018 tentang pendirian Badan Hukum Perkumpulan Aliran Kebatinan “Perjalanan” serta terdaftarnya organisasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung, Nomor: 37/ORMAS-DU/BKBP/2013 tertabggal 30 Juli 2013.

Sumber daya moral lain yang dimiliki organisasi Aliran Kebatinan Perjalanan yaitu adanya simpatisan-simpatisan dan dukungan solidaritas yang terlibat dalam pergerakan baik simpatisan yang bersimpati terhadap kepercayaan yang dianut maupun simpatisan yang mendukung AKP sebagai kelompok yang termarjinalkan. Dukungan solidaritas yang datang dari kepercayaan yang sama namun belum mengakui dan belum mengganti status keagamaan dalam kartu tanda penduduk, disebut sebagai Pra-warga. Pra-warga sendiri merupakan mereka yang disebabkan oleh satu dan lain hal masih belum dapat diterima sebagai warga penuh, akan tetapi mempunyai kewajiban-kewajiban yang sama dengan warga-warga lainnya dalam kehidupan Aliran Kebatinan “Perjalanan”.

Sumber daya kultural yang dimiliki AKP terpotret dari disebarluaskannya kegiatan kepercayaan dan sumber-sumber referensi aliran di situs khusus milik AKP dan grup Facebook, ditambah dengan adanya beberapa video dokumenter yang memperkenalkan kelompok aliran kepercayaan secara umum, ditambah kolaborasi yang dilakukan kelompok Aliran Kebatinan Perjalanan di Youtube yang kini kian marak disebar sebagai media informasi bagi khalayak umum digunakan untuk menunjang gerakan sosial Aliran Kebatinan Perjalanan ini sendiri. Sumber daya manusia (human resources) dari kelompok aliran kebatinan perjalanan pun cukup memadai, di mana kini banyak para anggota aliran kebatinan perjalanan yang memiliki pendidikan tinggi serta jabatan-jabatan di ranah publik yang dapat dijadikan ranah untuk menyebar luaskan tujuan yang dicita-citakan. Seperti adanya generasi-generasi muda aliran kebatinan perjalanan yang mengembangkan diri dalam sub-bidang organisasi seperti gema pakti (kelompok generasi muda AKP). Selain itu ada pula warga AKP yang menjabat sebagai dosen yang berhubungan langsung pula ke kementerian, serta adanya penyuluh-penyuluh aliran kebatinan perjalanan yang mengajarkan para generasi selanjutnya AKP di jenjang pendidikan. Penyuluh AKP merupakan orang yang telah memiliki sertifikasi sebagai tenaga pendidik untuk melaksanakan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. Sedangkan sumber daya material (material resources) yang dimiliki AKP terdapat dari iuran wajib yang perlu dibayarkan warga dan pra-warga, sumbangan tidak mengikat, dan pasewakan yang bertempat di Ciparay, Bandung.

Jaringan dan partisipasi dalam gerakan sosial dalam AKP dilihat dari bagaimana organisasi mengelola dan merawat jaringan serta partisipasi dalam gerakan sosial. Salah satu perawatan jaringan yang dilakukan AKP adalah dengan terus berkomunikasi dengan simpatisan yang memiliki kepercayaan yang sama namun belum ingin masuk sebagai penghayat akibat akses yang tidak didapatkan bagi para penghayat yang sudah mencantumkan kepercayaan penghayat dalam kartu tanda penduduk. Serta adanya program keluar dengan maksud terus menjalin kerjasama dan hubungan yang baik dengan instansi pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tidak lain bertujuan untuk mempergiat/ memperluas gerakan penerangan tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Faktor determinan yang terakhir dari keberhasilan gerakan Aliran Kebatinan Perjalanan, ialah peluang dan kapasitas masyarakat. Peluang dan kapasitas masyarakat dalam AKP yang paling mencolok terlihat dari tingkat represi masyarakat atau penerimaan masyarakat terhadap kelompok aliran kebatinan perjalanan ini di lingkungannya yang tidak memperlmasalahkan keberadaan aliran ini, dan semakin meningkatkan simpatisan eksternal yang membantu kelompok AKP, kekuatan politik pun lebih kuat dari

adanya pembentukan organisasi luar yang di wadahi oleh pemerintah memberikan akses organisasi untuk terus melakukan pergerakan yang lebih intens dan massif.

Simpulan

Organisasi Aliran Kebatinan Perjalanan di Kota Bandung telah berhasil melakukan gerakan sosial, yang terlihat dari keberhasilan organisasi Aliran Kebatinan Perjalanan bersama kelompok aliran kepercayaan yang lain untuk diakui secara hukum dengan turunnya Keputusan Mahkamah Konstitusi pada No . 97/PUU-XIV/2016. Surat Keputusan MK ini berisi aturan yang mengizinkan kelompok aliran kepercayaan mengosongkan kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau bahkan mengantinya menjadi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keberhasilan perjuangan ini jika ditelisik dalam kacamata gerakan sosial khususnya teori mobilisasi sumber daya (resources mobilization theory) dapat terjadi karena adanya pembentukan organisasi untuk melanggengkan gerakan menuju tujuan yang ingin dicapai, serta adanya mobilisasi sumber daya yang dimiliki organisasi Aliran Kebatinan Perjalanan di Kota Bandung. Organisasi Aliran Kebatinan Perjalanan di Kota Bandung secara gerakan sosial dapat berhasil dan tetap eksis akibat ketersediaan sumber daya yang terus dirawat bahkan diperluas demi tujuan yang ingin dicapai. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan dari gerakan sosial dapat terwujud apabila organisasi mampu memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk fokus pada pencapaian tujuan bersama, melalui kerjasama anggota kelompok.

Rujukan

- Amrullah, A. (2017). Aliran Kepercayaan, PKI, dan Orde Baru. Republika. <https://www.republika.co.id/berita/oztqzq282/aliran-kepercayaan-pki-dan-orde-baru-part1>
- Bayat, A. (2005). Islamism Theory Social Movement. *Third World Quarterly*, 26(6), 891–908. <https://doi.org/10.1080/01436590500089240>
- Budijanto, O. W. (2016). Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung. *Jurnal HAM*, 7(1), 35–45. <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.69>
- Bustami, A. L. (2016). Perempuan Penghayat: Analisis Pilihan Peran Antara Budaya Patriarki dan Otonomi Diri dalam Penguatan Organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.
- Cacheda, B. G., & Outeda, C. C. (2021). Political crowdfunding and resource mobilization for collective action: The keys to success. *Technology in Society*, 67, 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101743>
- Edwards, B., & Gillham, P. F. (2013). *Resource Mobilization Theory*. In and D. M. David A. Snow, Donatella della Porta, Bert Klandermans (Ed.), *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements* (pp. 1–6). Blackwell Publishing Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781483391144.n325>
- Fariyah, R. (2020). Rindang Putusan MK nomor 97/PUU- XIV/2016 dan Pengaruhnya Terhadap Perubahan Identitas Perempuan Penghayat. *Staatsrecht: Indonesian Constitutional Law Journal*, 4(1), 1–22.
- Febriani, L. (2017). Mobilisasi Sumberdaya dalam Gerakan Literasi: (Studi Pada Gerakan Vespa Pustaka). *Society*, 5(1), 59–67. <https://doi.org/10.33019/society.v5i1.20>
- Giddens, A., & Sutton, P. (2017). *Essential Concept in Sociology*. Polity Press.
- Golhasani, A., & Hosseinirad, A. (2016). The Role of Resource Mobilization Theory in Social Movement. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 3(6), 1–5. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v3i6.58>
- Goodwin, J., & Jasper, J. M. (2015). *The Social Movements Readers, Case and Concept (Third Edit)*. Wiley Blackwell.
- Hakiki, K. M. (2011). Politik Identitas Agama Lokal (Studi Kasus Aliran Kebatinan). *Jurnal Analisis*, 6(1), 159–174.
- Hamid, A. L. (2018). Politik Identitas Agama Lokal Studi tentang Aliran Kepercayaan Perjalanan Ciparay Bandung. *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 1(2), 113–130.
- Haris, A., AB Rahman, A. Bin, & Wan Ahmad, W. I. (2019). Mengenal Gerakan Sosial dalam Perspektif Ilmu Sosial. *Hasanuddin Journal of Sociology*, 1(1), 15–24. <https://doi.org/10.31947/hjs.v1i1.6930>
- Harsyahwardhana, S. (2020). Judicial Review Uu Administrasi Kependudukan Terhadap Penghayat Aliran Kepercayaan. *Arena Hukum*, 13(2), 369–387. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.10>
- Haryanto, Hairini, S. M., & Bakar, A. (2013). PKBI: Aktor Intermediary dan Gerakan Sosial Baru. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 16(3), 187–199. <https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10902>
- Hernandi, A. (2014). Eksistensi Organisasi dan Kehidupan Kepercayaan terhadap Tuhan YME.

- Jufri, M. (2020). Potensi Penyetaraan Agama dengan Aliran Kepercayaan di Indonesia (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016). *Jurnal Yudisial*, 13(1), 21–36. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i1.360>
- Jufri, M., & Mukhlis, M. (2019). Akibat Hukum Pemisahan Hak Beragama dengan Hak Berkepercayaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 274–295. <https://doi.org/10.31078/jk1624>
- Jurdi, S. (2013). *Sosiologi Nusantara: Memahami Sosiologi Integralistik*. Jakarta: Kencana.
- Konradus, B. (2018). Peningkatan Peran Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk Menjaga Kebhinekaan dalam Kehidupan Kebangsaan. *Jurnal Communitio: Jurnal Jurusan Ilmu ...*, 7(2), 1237 – 1243. <https://doi.org/https://doi.org/10.35508/jikom.v7i2.2043>
- Kurniawan, F. (2017). Seberapa Banyak Jumlah Penghayat Kepercayaan di Indonesia. *Tirto.Id*. <https://tirto.id/seberapa-banyak-jumlah-penghayat-kepercayaan-di-indonesia-cz2y>
- Lampe, I. (2018). Pola Komunikasi Gerakan Sosial Komunitas Sekitar Tambang Migas Tiaka: Refleksi Identitas Etnik Lokal. *Jurnal ASPIKOM*, 3(5), 860–873. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i5.334>
- Langman, L. (2013). Occupy: A new new social movement. *Current Sociology*, 61(4), 510–524. <https://doi.org/10.1177/0011392113479749>
- Locher, D. (2002). *Collective Behavior*. UK: Prentice Hall.
- Lubis, D. (2019). *Aliran Kepercayaan/Kebatinan* (1st ed.). Jakarta: Perdana Publishing.
- MARTYŃSKA, E. C. (2018). The Cultural Perspective in Social Movement Theories and Past Research on the Solidarity Movement. *Polish Sociological Review*, 1(201), 27–45.
- Moleong, L. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Muary, R., & Ismail, R. (2017). Gerakan sosial Budha Tzu Chi pasca reformasi di Kota Medan Post-reformation Budha Tzu Chi social movement in Medan Pendahuluan. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 30(3), 248–259.
- Nas, A. (2016). Advertising Resistance ? The Analysis of New Social Movements as Brand Communities Advertising Resistance ? The Analysis of New Social Movements as Brand. *International Journal of Humanities and Social Sciences*, 6(6), 136–143.
- Porta, D. Della, & Pavan, E. (2017). Repertoires of knowledge practices: Social movements in times of crisis. *Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal*, 8(1), 1–34. <https://doi.org/10.1108/QROM-01-2017-1483> Permanent
- Purnomo, H. (2005). Mengukur Aliran Informasi dan Tata Kelola Hutan Yang Baik: Studi Kasus Gerakan Nasional Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan (Gerhan) di Indonesia (Measuring Information Flows And Good Forest Governance: A Case Study Of The National Forest And Land Rehabilit. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 6(2), 28–41.
- Reger, J., Myers, D., & Einwohner, R. L. (2008). *Identity Work in Social Movements*. University of Minnesota Press.
- Riadi, B., & Drajat, D. (2019). Holistik Analisis Framing Gerakan Sosial: Studi Pada Gerakan. *Journal Holistik For Islamic Social Sciences*, 3(1), 10–18.
- Rusmanto, J. (2012). *Gerakan Sosial, Sejarah Perkembangan Teori antara Kekuatan dan Kelemahan* (1st ed.).
- Salfutra, R. D., Haryadi, D., & Darwance, D. (2019). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 bagi Orang Lom di Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 255. <https://doi.org/10.31078/jk1623>
- Santoso, A. G. (2015). Strategi Mobilisasi Sumber Daya Fundamentalisme Islam: Studi Hizbut Tahrir Indonesia. *Dialog*, 38(2), 221–236. <https://doi.org/10.47655/dialog.v38i2.47>
- Sari, D. K., & Siahainenia, R. R. (2015). Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual pada Kasus Satinah. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(1), 105–118. <https://doi.org/10.24002/jik.v12i1.446>
- Sari, D. K. (2018). Nasionalisme Sebagai Ajaran Spiritual Penghayat. *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 6(1), 1–20.
- Selinaswati, S. (2016). Mobilisasi Sumberdaya dan Identitas Kelompok dalam Menolak Ranperda Diskriminatif (Studi Kasus: Gerakan FKWIS Sumatera Barat, 2001). *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi V, Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia, Padang, 18 – 19 Mei 2016. Gerakan Sosial Dan Kebangkitan Bangsa*, 1, 202–212. <https://doi.org/10.4324/9781315026664-12>
- Singh, R. (2010). *Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: Resist Book.
- Subaktiar, M. I., & Indarti, T. (2020). Gerakan Mahasiswa dalam Novel Lelaki di Tengah Hujan Karya Wenri Wanhar (*Kajian Mobilisasi Sumber Daya*). 7(4), 1–10.
- Sukmana, O. (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Jakarta: Rosda

- Supriatna, E., Rusnandar, N., Nugraheni, F., Masduki, A., Andayani, R., & Merlina, N. (2003). Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa “Aliran Kebatinan Perjalanan” Di Kelurahan Cipayung Kecamatan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung.
- Suwarno, J. (2016). ‘Gerakan Muncar Rumahku’ dan Strategi Mobilisasi Sumber Daya Pada Gerakan Sosial Penyelamatan Lingkungan. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 3(2), 17.
- Teguh, T. (2019). Kala Kaum Urban Menjelajahi Dunia Kebatinan. Tirto.Id. <https://tirto.id/kala-kaum-urban-menjelajahi-dunia-kebatinan-de7R>
- Zahara, M. N. (2020). Gerakan Hijrah Sebagai Pembentukan Identitas Baru Generasi Muslim Milenial di Era Digital (Studi Fenomenologi pada Gerakan Shift Pemuda Hijrah di Kota Bandung). Universitas Pendidikan Indonesia.